



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 1558-1574

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Determinan Kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2022

Oktaria Denanda Christi<sup>1✉</sup>, Suryo Sakti Hadiwijoyo<sup>2</sup>, Daru Purnomo<sup>3</sup>

Universitas Kristen Satya Wacana

Email: [352018041@student.uksw.edu](mailto:352018041@student.uksw.edu)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo selama periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk mengidentifikasi determinan utama kemiskinan di daerah tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang bersumber dari BPS Kabupaten Kulon Progo yang sekaligus digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini yang meliputi angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, dan jumlah penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo.

Kata Kunci: *Determinan, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Jumlah Penduduk*

## Abstract

This study aims to analyze the determinant factors that influence the poverty rate in Kulonprogo Regency during the 2018-2022 period. This research uses quantitative approach with the multiple linear regression method to identify the main determinants of poverty in the area. The data used used in this study is panel data sourced from BPS Kulon Progo Regency, which is also used as a variable in this study. Kulon Progo Regency which is also used as a variable in this study which includes the poverty rate, economic growth, unemployment rate, and poverty rate. variables in this study which include poverty rate, economic growth, unemployment rate, and population, and population. The results showed that partially Partially, economic growth has a positive and significant effect on the poverty rate in Kulon Progo Regency. Meanwhile, the unemployment rate has a positive and significant effect to the poverty rate of Kulon Progo Regency. Meanwhile, the total population has a positive and significant effect on the poverty rate of Kulon Progo Regency

Keyword: *Determinants, Poverty, Economic Growth, Unemployment, Total Population*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang secara sosial maupun ekonomi untuk menjalani kehidupan yang layak. Kemiskinan adalah masalah yang memiliki banyak aspek, termasuk kesejahteraan ekonomi, kapasitas, dan inklusi sosial (Asselin, 2009; Wagle, 2008), dengan kompleksnya penyebab kemiskinan tersebut maka memerlukan penanganan secara komprehensif (Adji et al., 2020; Wagle, 2008).

Kebutuhan dasar manusia tercermin dalam berbagai dimensi antara lain pendapatan, pendidikan, kesehatan, nutrisi/makanan, sanitasi/air bersih, pekerjaan, rumah, akses terhadap aset produktif, akses terhadap pasar dan partisipasi dalam komunitas (Asselin, 2009). Selama tahun 2020-2021, pandemi COVID-19 berdampak pada kemiskinan di Indonesia, salah satunya adalah kehilangan pekerjaan dan menurunnya pendapatan masyarakat sebagai akibat dari penutupan atau pengurangan aktivitas ekonomi (Suryahadi et al., 2020).

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian Barat DIY yang terdiri dari 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun Tetangga, tidak lepas dari permasalahan kemiskinan dan penghidupan rumah tangga miskin (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2023; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, n.d.).

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo meningkat lebih dari tiga ribu jiwa pada Maret 2019–2020, naik dari 74.620 jiwa pada Maret 2019 menjadi 78.060 jiwa pada Maret 2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2023). Peningkatan ini kembali

terjadi pada Maret 2020–2021, ketika jumlah penduduk miskin kembali naik lebih dari tiga ribu jiwa menjadi 81.140 jiwa pada Maret 2021. Namun, pada tahun 2022 (Maret 2021–2022) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan hampir 8.000 menjadi 73.210 ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2023](#)).

Inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut jebakan kekurangan atau *deprivation trap* yang melilit keluarga miskin ([Chambers, 1987, 2006](#)). Terdapat lima hal yang menyebabkan ketidakberuntungan yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan, dimana kelima hal tersebut saling berhubungan satu sama lain ([Chambers, 1983, 1987](#)). Kerentanan dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sarana untuk menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana, penyakit dan sebagainya yang tiba-tiba menimpa keluarga itu ([Chambers, 1983, 1987, 2006; Chambers & Conway, 1991](#)).

Variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri ([Todaro & Smith, 2006](#)).

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah adanya faktor geografis, seperti salah satu contohnya adalah kesuburan tanah pertanian di suatu daerah yang mempengaruhi ekonomi suatu wilayah dan pembangunan infrastruktur. Lokasi dan iklim di suatu daerah juga memiliki dampak yang besar pada tingkat pendapatan dan pertumbuhan dikarenakan makmur atau tidaknya suatu daerah dapat dilihat dari letak geografisnya.

Karakteristik kemiskinan di perkotaan dapat diidentifikasi dari akses mereka terhadap lingkungan permukiman dan tempat tinggal mereka yang kumuh ([Hasna, 1995; Kayaga et al., 2020](#)), selain itu juga ditandai dengan tingkat kepadatan hunian yang sangat tinggi ([Kayaga et al., 2020; Wang, 2004](#)), akses terhadap lahan yang terbatas ([Andersson Djurfeldt, 2021](#)), tergantung pada pekerjaan sektor non formal, termasuk penduduk perkotaan yang tanpa sumber pekerjaan dan/atau pendapatan yang termiskin dan paling terpukul dan dengan demikian menjadi kelompok yang paling rentan ([Olajide et al., 2018; Weldearegay et al., 2021](#)). Sedangkan kemiskinan di perdesaan ditandai dengan letaknya yang terkonsentrasi di daerah-daerah terpencil ([Das et al., 2021; El-Ghonemy, 2006](#)), seperti pegunungan dengan medan yang sulit dijangkau ([Das et al., 2021](#)), pulau-pulau yang jauh dari perkotaan, daerah berhutan ([Putraditama et al., 2021; Waruingi et al., 2021](#)), dan daerah

gersang dengan populasi rendah ([Brandt & Otzen, 2006](#); [Hasibuan et al., 2019](#); [Ikawati & Wahyuni, 2016](#); [Isworo & Mardiansjah, 2020](#)).

Kondisi dan karakteristik kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo berkaitan erat dengan karakteristik ekologi, sosial kemasyarakatan, maupun kultural di Kabupaten Kulon Progo ([Isworo & Mardiansjah, 2020](#)). Kondisi Kabupaten Kulon Progo yang variatif dari sisi geografis maupun sosiologis, menjadi penyebab variatifnya karakteristik kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo ([Isworo & Mardiansjah, 2020](#)). Kondisi di berbagai daerah tersebut berkaitan dengan dengan determinan karakteristik kemiskinan ([Putra & Suharto, 2024](#); [Risnawati et al., 2023](#); [Yuwono Yudo Nugroho & Janahtul Isnaini, 2020](#)).

Berbagai determinan kemiskinan dapat berupa pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan juga jumlah penduduk terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin ([Nalle et al., 2022](#)), dimana dalam risetnya di Nusa Tenggara Timur ([Nalle et al., 2022](#)) menyampaikan bahwa secara parsial maupun simultan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan juga jumlah penduduk terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh ([Putra & Suharto, 2024](#)) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan, yang ditandai dengan dengan temuan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di D.I. Yogyakarta. Sedangkan UMK tidak berpengaruh terhadap dinamika kemiskinan di D.I. Yogyakarta ([Putra & Suharto, 2024](#)).

Selanjutnya, determinan kemiskinan dapat juga dikaji dalam aras lokal, bahkan dalam lingkup rumah tangga ([Suprianto et al., 2019](#)). Pada aras rumah tangga, sebagaimana penelitian yang dilakukan di Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara, dapat diketahui bahwa pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, dan pendapatan mempunyai pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga ([Suprianto et al., 2019](#)).

Dari beberapa kajian tersebut menunjukkan bahwa studi tentang kemiskinan perlu dilakukan. Mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang tidak sama maka variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan akan berbeda setiap wilayah. Hal inilah yang menjadi urgensi perlunya penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, dimana menurut ([Sugiyono, 2017](#)) penelitian kuantitatif merupakan penelitian berupa angka-angka dan analisis-*analisis* menggunakan statistik. Dengan kata lain, dalam penelitian kuantitatif peneliti berangkat dari

sebuah teori (menguji sebuah teori) menuju data dalam bentuk angka dan berakhir pada penerimaan atau penolakan dari teori yang telah diuji kebenarannya (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel, dimana data yang digunakan adalah data series yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo dan data dari BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data series yang sekaligus digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini berupa data sekunder sebagai variabel penelitian, yaitu yang berupa data angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, dan jumlah penduduk.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable kemiskinan dengan menggunakan data angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dimana data tersebut dinyatakan dalam satuan persen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, dan jumlah penduduk..

Selanjutnya model analisis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2018).

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Adapun analisis regresi linier berganda yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	=	Tingkat Kemiskinan
$\beta_0$	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisiensi Regresi
X1	=	Pertumbuhan Ekonomi
X2	=	Pengangguran
X3	=	Jumlah Penduduk
e	=	Faktor pengganggu

Sedangkan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan Uji Secara parsial (Uji-t) untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada saat uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai pada t tabel. Adapun kriteria dari uji statistik t (Ghozali, 2018): (1) Jika nilai signifikansi uji t > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen; dan (2) Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan

Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luasan wilayah sebesar 586,28 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun Tetangga, tidak lepas dari permasalahan kemiskinan dan penghidupan rumah tangga miskin (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2023; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, n.d.).

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan garis kemiskinan Tahun 2021 sebesar Rp360.202,00 naik dari Tahun 2020 yang sebesar Rp350.807,00, sedangkan Garis Kemiskinan sebesar Rp360.202,00 yang artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp360.202,00, selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2023). Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa, garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo terus meningkat dari tahun.

Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Berikut merupakan data tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

No	Tahun	Tingkat Kemiskinan
1	2018	18,30
2	2019	17,39
3	2020	18,01
4	2021	18,38
5	2022	16,39

Sumber: BPS Kabupaten Kilon Progo, 2023(Data Diolah)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo pada periode 2018-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Persentase penduduk miskin Kulon Progo di tahun 2018 tercatat sebesar 18,30 persen yang kemudian terjadi penurunan pada tahun berikutnya menjadi 17,39 persen. Setelah itu pada tahun 2020 dan 2021 terus terjadi peningkatan

dengan masing-masing menjadi sebesar 18,01 persen dan 18,38 persen. Namun penurunan tajam terjadi di tahun 2022 yakni menjadi 16,39 persen di mana hal tersebut juga telah melampaui proyeksi sebelumnya hampir sebesar 1 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2023). Penurunan ini didorong oleh tumbuhnya perekonomian dari tahun sebelumnya sehingga dapat mengangkat banyak penduduk dari garis kemiskinan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha pasca Covid-19, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo diproyeksikan akan menurun menjadi 15,51 persen pada Tahun 2023.

Dinamika Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tidak dapat dilepaskan dari kondisi kemiskinan di kabupaten/kota lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun kondisis kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan. Selain prosentase penduduk miskin, dinamika kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo diidentifikasi dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Tabel 2 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dengan kabupaten/kota dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	2,47	2,72	3,32	3,01	2,32
Bantul	2,17	1,87	1,85	2,24	2,11
Gunung Kidul	3,84	2,58	2,68	2,98	2,63
Sleman	0,98	1,13	1,37	1,26	1,18
Kota Yogyakarta	0,98	0,85	1,19	1,07	0,80
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2,09	1,74	1,94	2,42	2,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2023 (data diolah)

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022 selalu berada di atas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (ketrampilan) dan pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja.

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2018-2022 mengalami penurunan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan mengalami

peningkatan cukup drastis pada Tahun 2022.

Tabel 3 Perbandingan Indeks Kearifan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dengan kabupaten/kota dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	0,56	0,61	0,86	0,75	0,56
Bantul	0,46	0,43	0,43	0,54	0,50
Gunung Kidul	1,16	0,53	0,63	0,76	0,67
Sleman	0,20	0,23	0,33	0,32	0,27
Kota Yogyakarta	0,34	0,20	0,20	0,21	0,13
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,50	0,38	0,46	0,65	0,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2023 (data diolah)

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Kearifan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2018-2022 mengalami penurunan namun pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Hal ini tentu terkait dengan pandemi global serta adanya tekanan terhadap perekonomian masyarakat secara luas khususnya masyarakat miskin.

#### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di suatu wilayah, penambahan pendapatan tersebut adalah kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di suatu wilayah tersebut. Pengambilan data pada variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan data Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022 dalam satuan persen, sebagaimana Tabel 3 berikut

Tabel 3. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2018	10,83
2	2019	13,49
3	2020	-3,45
4	2021	4,37
5	2022	6,57

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2023 (Data Diolah)

Pada Tahun 2022, aktivitas perekonomian semakin meningkat setelah pemulihan

pasca Covid-19 pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten yang terjadi mulai tahun 2021 ([Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, n.d.](#)). Pada Tahun 2022 ekonomi Kabupaten Kulon Progo tumbuh sebesar 6,57 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tumbuh 5,15 persen ([Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, n.d.](#)). Terjadinya pertumbuhan positif ini terjadi pada banyak sektor yang mengindikasikan terjadinya pemulihan ekonomi setelah terjadi Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022, sektor yang tumbuh cukup tinggi adalah Transportasi dan Pergudangan (31,76 persen), Jasa Lainnya (13,94 persen), dan Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman (12,73 persen) ([Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, n.d.](#)). Kemudian berikutnya sektor Jasa Perusahaan (6,97 persen), dan kelima sektor Pengadaan Listrik dan Gas (6,61 persen) ([Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, n.d.](#)).

Selanjutnya Hasil uji (parsial) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3 berikut berikut:

Tabel 4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

Variabel	T	Sig.
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	-38,410	0,017

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) diperoleh t hitung -38,410 dan p-value  $0,017 < 0,05$ , maka H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022. Artinya bahwa jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo akan semakin menurun.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan makro di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022. Artinya bahwa jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo akan semakin menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian ([Binti, 2017](#)) bahwa ada hubungan

yang negatif (-0.356) antara pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah selama 6 tahun terakhir. Penelitian (Salsabil & Rianti, 2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Barat tahun 2016-2020.

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi kekuatan pendorong untuk menghasilkan kekayaan yang nantinya akan menetes kebawah untuk memberantas kemiskinan dan semua masalah yang menyertainya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian (Susanto & Pangesti, 2021). Hasil penelitian ini memiliki nilai koefisien sebesar -0.217803 dan probabilitas sebesar 0.0000 yang artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dimana setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen akan mengurangi tingkat kemiskinan sebanyak 0.217803 persen.

#### Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah pertumbuhan penduduk bukanlah sekedar masalah jumlah, masalah penduduk juga menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan.

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergoong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena ketidak sesuaian antara permintaan dan penyediaan dalam pasar kerja. Bentuk-bentuk ketidaksesuaian pasar kerja antara lain akan menyebabkan banyaknya macam-macam pengangguran yaitu friksional, musiaman, siklikal, struktural, dan teknologis. Berikut merupakan data pengangguran di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022.

Tabel 5 Data Pengangguran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

No	Tahun	Pengangguran (%)
1	2018	1,51
2	2019	1,80
3	2020	3,71
4	2021	3,69
5	2022	2,80

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2023 (Data Diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo periode 2018-2022 selalu berada di bawah TPT DIY maupun Nasional. Tahun 2018 masih menjadi tahun dengan

angka TPT terendah di Kulon Progo yaitu 1,51 persen. Selanjutnya terjadi peningkatan di tahun 2019 menjadi 1,8 persen hingga puncaknya pada tahun 2020 yaitu 3,71 persen (Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, n.d.). TPT Kulon Progo mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 menjadi 3,69 persen kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 yaitu menjadi 2,80 persen walaupun belum mendekati TPT sebelum Pandemi Covid- 19 yang berada di bawah 2 persen. Namun angka ini telah melampaui 2,77 persen yang mana merupakan target yang diproyeksikan di tahun 2022.

Penurunan TPT Kulon Progo pada tahun 2022 bersamaan dengan perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Penguatan ekonomi menyebabkan lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuka di Kulon Progo dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mendorong semakin banyak orang untuk bekerja. Hal ini terlihat dengan peningkatan sebesar 13 ribu penduduk yang bekerja pada tahun 2022. Kesempatan kerja di Kabupaten Kulon Progo juga mengalami peningkatan dan berdampak langsung terhadap penurunan TPT. Melihat tren dan kondisi yang mulai membaik, TPT Kabupaten Kulon Progo diharapkan terus mengalami penurunan, hal ini mendasari proyeksi TPT Kabupaten Kulon Progo yang menurun menjadi 2,73 persen pada tahun 2023.

Selanjutnya hasil uji (parsial) pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan makro di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6 Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Makro di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

Variabel	T	Sig.
Pengangguran (X2)	38,062	0,017

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa, variabel pengangguran diperoleh t hitung 38,062 dan p-value  $0,017 < 0,05$ , maka H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan makro di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022. Artinya bahwa jika persentase tingkat pengangguran semakin meningkat, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo akan semakin meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022. Artinya bahwa jika pengangguran semakin meningkat, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Budhijana, 2019) menunjukkan bahwa pengangguran terbukti berpengaruh positif dan nyata atau signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2000-2017. Hasil penelitian (Fajriansyah & Chandriyanti, 2022) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, artinya dengan lapangan pekerjaan yang lebih banyak maka seseorang tidak akan menganggur, sehingga menghasilkan pendapatan yang mana hal tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan atau sebaliknya dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan, maka menyebabkan masyarakat tidak memiliki pendapatan sehingga mengakibatkan peningkatan kemiskinan. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Dimana, semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah yaitu kemiskinan.

#### Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Di negara berkembang pertumbuhan penduduk yang sangat besar jumlahnya menambah kerumitan dalam proses pembangunan. Masalah pertumbuhan penduduk merupakan masalah pembangunan yang paling utama yang sulit diatasi. Berikut merupakan data jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022.

Tabel 7 Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2018	425758
2	2019	430220
3	2020	436395
4	2021	442874
5	2022	433960

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 jumlah penduduk sebesar 425758 jiwa, tahun 2019 sebesar 430220 jiwa, tahun 2020 sebesar 436395 jiwa, tahun 2021 sebesar 442874 jiwa, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 433960 jiwa. Perubahan jumlah penduduk, baik itu mengalami penambahan atau pengurangan, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan

perkapita.

Tabel 8 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

Variabel	T	Sig.
Jumlah Penduduk	37,891	0,017

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa, variabel jumlah penduduk diperoleh t hitung 37,891 dan p-value  $0,017 < 0,05$ , maka H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan makro di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022. Artinya bahwa jika persentase jumlah penduduk semakin meningkat, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan makro di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022. Artinya bahwa jika jumlah penduduk semakin meningkat, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian ([Salsabil & Rianti, 2023](#)) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Selain itu penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ([Trisnu & Sudiana, 2019](#)) tentang "Analisis pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Bali", dimana dalam penelitian didapatkan hasil pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Hal ini dikarenakan salah satunya memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam perekonomian suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022. Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat berpotensi menurunkan

angka kemiskinan. Selain itu, secara parsial tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022, dengan demikian jika persentase tingkat pengangguran semakin meningkat, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo akan semakin meningkat. Selanjutnya secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo. Meningkatnya persentase jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo, akan berpotensi diikuti dengan peningkatan angka kemiskinan.

Selanjutnya dalam upaya penganggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dan diintegrasikan antara lain melalui peningkatan akses terhadap peluang dan kesempatan kerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan penguatan perlindungan sosial menjadi salah satu alternatif dalam yang dapat dilakukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan. *Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)*.
- Andersson Djurfeldt, A. (2021). Translocal livelihoods research and the household in the Global South – A gendered perspective. *Journal of Rural Studies, 86*(June), 16–23. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.018>
- Asselin, L.-M. (2009). *Analysis of Multidimensional Poverty: Theory and Case Study*. Springer: International Development Research Centre. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0843-8>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2023). Ringkasan Eksekutif Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2023. In *BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KULON PROGO*. <https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/2023/12/28/5a36ac301c0ba9f2e224e8f6/ringkasan-eksekutif-kondisi-kemiskinan-kabupaten-kulon-progo-2023.html>
- Binti, M. T. (2017). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Kalimantan Tengah. *AI-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN, 3*(2), 69–78.
- Brandt, H., & Otzen, U. (2006). Poverty orientated agricultural and rural development. In

- Budhijana, R. B. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, index pembangunan manusia (IPM) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(1), 36–44.
- Chambers, R. (1983). Rural development: putting the last first. In *International Affairs* (Vol. 60, Issue 3). Routledge. <https://doi.org/10.2307/2617619>
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang* (M. D. Rahardjo (ed.); 1st ed.). Ford Foundation dan LP3ES.
- Chambers, R. (2006). Editorial Introduction: Vulnerability, Coping and Policy. *IDS Bulletin*, 37(2), 33–40. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.1989.mp20002001.x>
- Chambers, R., & Conway, G. R. (1991). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. *IDS Discussion Paper, 296*(Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex).
- Das, A., Datta, D., Samajdar, T., Idapuganti, R. G., Islam, M., Choudhury, B. U., Mohapatra, K. P., Layek, J., Babu, S., & Yadav, G. S. (2021). Livelihood security of small holder farmers in eastern Himalayas, India: Pond based integrated farming system a sustainable approach. *Current Research in Environmental Sustainability*, 3, 100076. <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100076>
- El-Ghonemy, M. R. (2006). The political economy of rural poverty: The case for land reform. In *The Political Economy of Rural Poverty: The Case for Land Reform*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203013304>
- Fajriansyah, S., & Chandriyanti, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 558–570.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. In *Badan Penebit Universtas Diponogoro* (9th ed.). Semarang.
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Sebaran Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 79–91. <https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.79-91>
- Hasna, M. K. (1995). Street hydrant project in Chittagong low-income settlement. *Environment & Urbanization*, 7(2), 207–218. <https://doi.org/10.1177/095624789500700210>

- Ikawati, & Wahyuni, S. (2016). Kondisi Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(2), 191–202.
- Isworo, E. J., & Mardiansjah, F. H. (2020). Rural poverty characteristics in Kokap Sub-District, Special Region of Yogyakarta Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 447(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012060>
- Kayaga, S., Fisher, J., Goodall, S., Kanyesigye, C., Kaggwa, R., Nambiro, M., Kitakufe, R., Otema, J. B., Mafunguro, R., & Ahabwe, G. (2020). Enhancing livelihoods of the urban poor through productive uses of utility-supplied water services – Evidence from Kampala, Uganda. *Cities*, 102(April), 102721. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102721>
- Nalle, F. W., Seran, S., & Bria, F. (2022). Analisis Determinan Kemiskinan Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 206–220. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.4962>
- Olajide, O. A., Agunbiade, M. E., & Bishi, H. B. (2018). The realities of Lagos urban development vision on livelihoods of the urban poor. *Journal of Urban Management*, 7(1), 21–31. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.03.001>
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. <https://dislautkan.jogjaprovo.go.id/informasi/rencana-pembangunan-daerah-2023-2026>
- Putra, A. R., & Suharto, S. (2024). Determinan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 143–148. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art4>
- Putraditama, A., Kim, Y. S., & Baral, H. (2021). Where to put community-based forestry?: Reconciling conservation and livelihood in Lampung, Indonesia. *Trees, Forests and People*, 4(October 2020), 100062. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2021.100062>
- Risnawati, R., Olilingo, F. Z., Payu, B. R., & Abdul, I. (2023). Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 20–36. <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i2.22208>
- Salsabil, I., & Rianti, W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15–24.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B* (ALFABETA (ed.)).
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Suprianto, Rachman, R., & Lestari, W. P. (2019). Analisis Determinan Kemiskinan dalam

- Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 102–114. <https://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jeb/article/view/526>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft). *SMERU Working Paper, April*(April), 1–20. <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271–278.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic development, Ninthth edn*. Pearson Addison Wesley, Boston.
- Trisnu, C., & Sudiana, I. K. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(11), 2622–2655.
- Wagle, U. (2008). *Multidimensional Poverty Measurement, Concept and Applications*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-75875-6>
- Wang, Y. P. (2004). *Urban Poverty, Housing and Social Change in China.pdf*. Routledge.
- Waruingi, E., Mbeche, R., & Ateka, J. (2021). Determinants of forest dependent household's participation in payment for ecosystem services: Evidence from Plantation Establishment Livelihood Improvement Scheme (PELIS) in Kenya. *Global Ecology and Conservation*, 26, e01514. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01514>
- Weldearegay, S. K., Tefera, M. M., & Feleke, S. T. (2021). Impact of urban expansion to peri-urban smallholder farmers' poverty in Tigray, North Ethiopia. *Heliyon*, 7(6), e07303. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07303>
- Yuwono Yudo Nugroho, R., & Janahtul Isnaini, S. J. I. (2020). Analisis Determinan Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2018. *Jurnal GeoEkonomi*, 11(2), 176–187. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i2.120>